

POLITIK PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Rahiman Dani

rahimandani@gmail.com

Pascasarjana Universitas Hazairin Bengkulu

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif. Sebab, pendidikan bersifat sistemik dengan tingkat penyebaran yang cukup merata. Lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan telah tersebar secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Pendidikan menjadi alat penting bagi perkembangan suatu bangsa, secara otomatis kualitas dari peserta didik mulai dari (kognisi, afeksi, hingga psikomotorik) tergantung pada pendidikan yang didapatkannya. Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.

Kata Kunci: *Politik, Politik Pendidikan, Multikultural*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari sudut pandang masyarakat dan kedua dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara, ada yang bersifat intelektual, seni, ekonomi, politik dan agama.

Jika dilihat dari kaca mata individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi, individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam ikat tetapi tidak tampak, perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi makanan dan hiasan bagi manusia, manusia mempunyai berbagai bakat dan kemampuan yang jika pandai

menggunakannya akan menjadi emas dan intan. Jadi pendidikan dari pandangan individu adalah menggarap kekayaan yang terpendam pada setiap individunya.¹

Pada dasarnya pendidikan adalah upaya alami untuk mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan, secara alamiah sejak pertama manusia yang berstatus orangtua akan mendidik anaknya agar bertahan hidup sehingga kehidupan dan keturunannya terus berlangsung.²

Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat.³

Dalam berbagai nilai ini terpadu dalam satu hal layaknya suatu bangunan rumah adat yang memiliki kejelasan warisan intelektual, seni, ekonomi, politik dan agama dari setiap daerah yang menciptakan khas dari setiap pemiliknya.

B. PENDIDIKAN

Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.⁴

Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif. Sebab, pendidikan bersifat sistemik dengan tingkat penyebaran yang cukup merata. Lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan telah tersebar secara luas di

¹ Hasan Langgulung. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. (Jakarta: PT Al Husna Zikra, 2000), h. 1

² A Tafsir. *Pendidikan Multikultural*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 66

³ Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*. EDUCHILD. Vol.01 No.1 Tahun 2012, h. 1

⁴ Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 32

berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana yang cukup efektif untuk mencapai tujuan ideal ini.⁵

Pendidikan yang mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman. Untuk mengembangkan orientasi hidup kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang majemuk diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial yang positif ini, menurut Donna M. Gollnick dan Lawrence A. Blum antara lain, mengambil bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima dan menghargai keragaman.⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 ia menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.⁷

Pendidikan adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar dalam rangka mencapai kematangan intelektual, sosial dan spiritual. Dalam arti luas berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup dan upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, di luar sekolah dan keluarga.⁸

Pemerintah membuat seperangkat aturan dan kebijakan berkenaan dengan mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat, mulai dari dikeluarkannya UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hingga aturan-aturan turunannya, seperti PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen (30 Desember 2005), PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (5 Oktober 2007), PP No 47/2008

⁵ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2008, h. 8.

⁶ Achmad Rois. *Pendidikan Islam Multikultural*. Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013 J 303, H. 11

⁷ Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural...*, h. 33

⁸ Ahmad Arifi. *Politik Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 8

tentang Wajib Belajar dan PP No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan (4 Juli 2008).⁹

Amanat undang-undang sangat terkait dengan kewajiban negara (Pemerintah) terhadap warga negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak (Bermutu), paling tidak hal ini dapat dilihat dari program penuntasan wajib belajar 9 tahun.¹⁰

Sumber-sumber biaya pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan yang dipertegas lagi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Tahun 2003) pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)”.¹¹

Proses pendidikan sebagai media pengembangan pola keberagaman berbasis inklusivisme, pluralis dan multikultural, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan multikultur, sebab dengan tertanamnya kesadaran demikian, sampai batas tertentu akan menghasilkan corak paradigma beragama yang *hanief*. Ini semua mesti dikerjakan pada *level* bagaimana membawa pendidikan agama dalam paradigma yang toleran dan inklusif.¹²

Pendidikan menjadi alat penting bagi perkembangan suatu bangsa, secara otomatis kualitas dari peserta didik mulai dari (kognisi, afeksi, hingga psikomotorik) tergantung pada pendidikan yang didapatkannya. Maka bagi pendukung humanistik pendidikan diartikan sebagai proses yang memberikan kebutuhan bagi pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang secara bebas dan bertanggung jawab, Selain itu, masa depan bangsa terletak dalam tangan generasi

⁹ Ahmad Arifi. *Politik Pendidikan Islam...*, h. 46

¹⁰ Ahmad Arifi. *Politik Pendidikan Islam...*, h. 49

¹¹ Undang-Undang Sisdiknas 2003 (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), H. 24

¹² Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi. *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*. Wekke p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816. Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, h 5

muda, mutu bangsa yang dikemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh peserta didik, terutama melalui pendidikan formal yang diterima di sekolah, dan apa yang dicapai disekolah ditentukan oleh kurikulum sekolah itu, dan dengan menguasai pendidikan akan memegang nasib bangsa dan negara. Dengan demikian, integritas bangsa tentang kerukunan “anti dominasi dan konflik” bisa terjaga melalui keberhasilan pendidikan yang mendekatkannya pada realitas multikultural yang di hadapi setiap peserta didik dalam kehidupannya.¹³

Pendidikan menjadi sarana rekayasa yang dapat mengarahkan seseorang untuk mengikuti dan menyakini kebenaran yang diperoleh melalui kerangka berfikir keilmuan yang dihasilkannya, menjadi sarana paling ampuh untuk pembentukan karakter pribadi seseorang serta propaganda nilai-nilai budaya yang dianggap penting bagi penggagas keilmuan tersebut. Di samping itu, pendidikan sebagai institusi sosial memiliki fungsi sebagai proses perubahan sosial yang mampu mengakomodir karakter sosial yang dimiliki masyarakat, yang bukan sekedar transfer informasi tentang ilmu pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu proses pembentukan karakter yang memiliki tiga misi utama yaitu; pewarisan pengetahuan (*transfer of knowledge*), pewarisan budaya (*transfer of culture*), dan pewarisan nilai (*transfer of value*). Sebab itu pendidikan dipahami sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.¹⁴

Pendidikan merupakan faktor penting, strategis dan determinatif bagi masyarakat, maju mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat/ bangsa sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kukuh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar yang

¹³ Muhammad Aji Nugroho. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif pada Umat Muslim*. Vol. 8, No. 1, Juni 2016: 31-60, DOI: 10.18326/mudarrisa.v8i1.31-60, h. 3

¹⁴ Muhammad Aji Nugroho. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif pada Umat Muslim*. Vol. 8, No. 1, Juni 2016: 31-60, DOI: 10.18326/mudarrisa.v8i1.31-60, h. 3

tidak terbatas hanya pada lingkungan sekolah akan tetapi tetap mempelajari segala sesuatu yang tidak ditemui di sekolah.¹⁵

C. POLITIK PENDIDIKAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia. Dikemukakan Anton H. Djawamaku (1985: 144) : “bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik”.¹⁶

Inilah esensi garapan bidang politik pendidikan nasional dalam rangka membangun kualitas manusia seutuhnya, masyarakat Indonesia seluruhnya, yang secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat.

Menurut Deliar Noer politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁷

Politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang

¹⁵ A Tafsir. *Pendidikan Multikultural*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 72

¹⁶ Abdulkadir B. Nambo. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*. Volume Xxi No. 2 April – Juni 2005, H. 2

¹⁷Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali, 1983), h. 6

diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.¹⁸

Mengingat masih minimnya akses masyarakat, terutama masyarakat bawah untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya, sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bermutu. Padahal, jika dilihat dari hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap warga negara, maka pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pendanaannya bagi pendidikan (yang bermutu) paling tidak saat ini pemerintah telah terfokus pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS). Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.¹⁹

Politik pendidikan (siyâsah atta‘lîm) suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas human resources (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan.²⁰

D. MULTIKULTURAL

¹⁸ Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*. EDUCHILD. Vol.01 No.1 Tahun 2012, h. 1

¹⁹ Ahmad Arifi. *Politik Pendidikan Islam...*, h. 52

²⁰ Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*. EDUCHILD. Vol.01 No.1 Tahun 2012, h. 4

Multikultural berasal dari kata *multi* (plural) dan *cultural* (tentang budaya), multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, atau pun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (sub-kultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.²¹

Konsep multikultural tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikultural mengulas berbagai permasalahan, yang mendukung ideologi ini yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang relevan.²²

Pendidikan multikultural, sebagai sebuah konsep, dipahami dan dimengerti orang dengan beragama cara. Pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep multikulturalisme. Sebab, konsep yang disebut terakhir ini merupakan konsep dasar yang menjadi latar belakang munculnya istilah pendidikan multikultural. Jadi, untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa implementasi konsep pendidikan multikultural oleh seseorang atau sekelompok orang, maka terlebih dahulu mesti diketahui bagaimana pemahaman mereka mengenai konsep dan ide-ide tentang multikulturalisme dan konsep pendidikan multikultural.

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kemampuan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap dan bertindak dalam menghadapi realita kehidupan yang berkemajuan dan berkeadilan didasari atas perbedaan multikultur dan multi-etnis. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai

²¹ Hendri Masduki. *Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama*. Dimensi, 2016, Vol 9(1), h. 6

²² A Tafsir. *Pendidikan Multikultural...*, h. 194

pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Pemahaman ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan itu sendiri dapat dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat.²³

Wacana multikultural dan multikulturalisme menjadi isu penting bahkan utama. Seiring munculnya berbagai konflik sosial, etnik, dan agama di masyarakat. Pemahaman akan suatu yang “beda” menjadi sebuah keniscayaan dalam penelusuran makna mendalam yang sangat urgen. Pada hakikatnya manusia dan realitas kehidupan yang melingkupinya lahir dari keberbedaan dan multidimensional. Pandangan dunia tentang multikultural secara substantif dalam konteks keindonesiaan bukan suatu hal yang baru. Karena sangat disadari, bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, etnis, ras, dan agama yang sangat banyak. Sehingga, secara sederhana bangsa Indonesia bangsa yang multikultural. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri.²⁴

Ketika memahami multikulturalisme orang akan terjebak kepada pemaknaan bahwa kata kunci yang dipakai adalah “kebudayaan”. Namun tampaknya ada kesepakatan bahwa untuk melihat kebudayaan sebagai bahasa, sejarah, kepercayaan, nilai-nilai moral, asal-usul geografis dan segala sesuatu yang dibagi (*shared*) dan digunakan sebagai rasa menjadi bagian sebuah kelompok yang khas. Inilah tampaknya yang ada dalam pikiran orang ketika berbicara tentang *multikulturalisme*.²⁵

E. POLITIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-

²³ Agus Munadlir. *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. Jpsd : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, h. 5

²⁴ Rini Dwi Susanti. *Menguk Multikulturalisme Di Pesantren*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 3

²⁵ Rini Dwi Susanti. *Menguk Multikulturalisme Di Pesantren*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 4

kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya Sementara itu, dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinterseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan.²⁶

Politik pendidikan harus hadir agar pendidikan Indonesia tidak terbawa arus perubahan lingkungan strategis yang tidak menguntungkan Indonesia. Mengingat mosaiknya tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan lingkungan strategis, maka diperlukan ketegasan arah politik pendidikan Indonesia. Berbicara politik pendidikan berarti mendekati pendidikan dengan politik sebagai takaran/tolok ukurnya. Tolok ukur politik pendidikan suatu negara sangat tergantung pada ideologi dan konstitusi suatu negara. Negara-negara barat yang berideologi ekonomi kapitalisme dan politiknya demokrasi liberal, maka politik pendidikannya jelas mengarah kepada pembangunan generasi muda yang kapitalistik dan liberalistik.²⁷

Pendidikan multikultural para pemerhati pendidikan mengharapkan pengembangan fokus dan atau pengayaan pendidikan nilai yang lebih memberikan penghormatan terhadap hak-hak seluruh warga negara, dengan tidak membedakan ras, agama, budaya dan warna kulit, dan tanpa mengurangi hak-haknya itu termasuk untuk kelompok minoritas yang mungkin tidak terwakili dalam lembaga-lembaga pemerintahan, apakah lembaga legislatif, ataupun lembaga birokrasi pemerintahan.²⁸

²⁶ Slamet Ph. *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. Xxxiii, No. 3, h. 3

²⁷ Slamet Ph. *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. Xxxiii, No. 3, h. 4

²⁸ Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 9

Multikultural sebuah konsep untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu.

Pendidikan multikultural untuk mengubah seluruh lingkungan atau suasana pendidikan, sehingga dengan pendidikan multikultural dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan peduli terhadap kelompok-kelompok budaya yang lain untuk mendapatkan pendidikan yang sama, tujuan utama yang terkait dengan pendidikan multikultural adalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia Ketiga aspek tersebut, walaupun terkait erat dengan aspek ekonomi, politik dan hukum, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan memiliki peran signifikan untuk mencetak manusia-manusia yang berkeadilan sosial, memiliki visi politik yang demokratis, dan menunjung tinggi hak dan martabat orang lain. Tidak mengherankan apabila pendidikan multikultural berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, kultural, moral, edukasional dan agama. Tanpa kajian bidang-bidang ini maka sulit untuk diperoleh suatu pengertian mengenai pendidikan multicultural.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan pilar-pilar kebangsaan, maka pembangunan pendidikan Indonesia harus menanamkan nilai-nilai patriotisme untuk membela NKRI dan menanamkan nilai-nilai toleransi berbasis perdamaian dan kerukunan yang diamalkan dalam bentuk kesolehan sosial. Di samping itu, Indonesia kaya sumber daya manusia, natural, kultural, dan sosial. Oleh karena itu, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia, yaitu pembangunan pendidikan yang benar-benar mendasarkan pada kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia.²⁹

²⁹ Slamet Ph. *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. Xxxiii, No. 3, h. 4

Dinamika sosial-kultural juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Tingkat perdamaian/kerukunan, kesadaran dan toleransi terhadap kemajemukan/kebhinnekaan dalam (suku, agama, ras, antargolongan, dan budaya), hak asasi manusia, persamaan kesempatan, tata kelola (formal vs informal), kesehatan masyarakat, dan kebudayaan, semuanya memiliki pengaruh terhadap pendidikan. Dinamika sosial-kultural ini harus diatasi dengan cara-cara yang bersumber dari kesadaran bertoleransi terhadap perbedaan, berbasis kerukunan, perdamaian, dan kebersamaan. Selain itu, upaya-upaya penataan ulang terhadap struktur/sistem (restrukturisasi/resistemisasi), figur (refigurisasi), dan kultur (rekulturisasi) perlu dilakukan selaras dengan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan. Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat/amanat peraturan perundang-undangan. Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituansinya, yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya, selain pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu.³⁰

Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun

³⁰ Slamet Ph. *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. Xxxiii, No. 3, h. 3

juga akan bagus. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu di era orde lama, pada tahun 1954, di era orde baru, dan saat ini di era reformasi. Budaya politik masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat.³¹

Politik pendidikan multikultural yaitu kebijakan pemerintah suatu Negara pada bidang pendidikan yang berupa perturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Politik pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas human resources (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan.

³¹ Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*. EDUCHILD. Vol.01 No.1 Tahun 2012, h. 10

DAFTAR PUSTAKA

- A Tafsir. *Pendidikan Multikultural*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- Abdulkadir B. Nambo. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*. Volume Xxi No. 2 April – Juni 2005
- Achmad Rois. *Pendidikan Islam Multikultural*. Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013
- Agus Munadlir. *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. JPSD : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016,
- Ahmad Arifi. *Politik Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2010
- Ahmad Zain Sarnoto. *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*. Educhild. Vol.01 No.1 Tahun 2012
- Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 32
- Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014
- Hasan Langgulung. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Al Husna Zikra, 2000
- Hendri Masduki. *Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama*. Dimensi, 2016, Vol 9(1)
- Muhammad Aji Nugroho. *Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagamaan Inklusif pada Umat Muslim*. Vol. 8, No. 1, Juni 2016.: 31-60, DOI: 10.18326/mudarrisa. vol. 31-60
- Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali, 1983
- Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke. *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagamaan Indonesia dalam Keberagaman*. p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816. Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017

Rini Dwi Susanti. *Menguak Multikulturalisme Di Pesantren*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

Slamet Ph. *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21*. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. Xxxiii, No. 3

Undang-Undang Sisdiknas 2003 Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003

<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/450/pdf>